

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlandaskan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menjalankan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi. Pemberian hak otonomi daerah membuat pemerintah daerah dapat menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun dalam rangka menjalankan kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah adalah salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut.

Keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah kemudian diukur dengan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja sangat diperlukan dalam melihat akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Akuntabilitas tidak sekedar menunjukkan kemampuan daerah dalam membelanjakan uang publik, akan tetapi termasuk kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Nugraha, 2017).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dapat diukur dengan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan

belanja daerah (APBD). Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan. Analisis rasio pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Sudaryo dkk, 2017).

Selain itu, efektifitas dan efisiensi belanja oleh instansi pemerintah selalu menjadi kajian dalam hal pengukuran kinerja sebuah instansi. Dalam penganggaran pemerintah, belanja dimasukkan ke dalam dua kategori besar, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung dan belanja tidak langsung tersebut digunakan dalam rangka penyelenggaraan daerah. Belanja langsung berkaitan dengan investasi pemerintah yang berimplikasi langsung pada kepentingan rakyat. Semakin besar alokasi belanja langsung dalam APBD, akan semakin mampu memenuhi dan membiayai keperluan yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi (Kristiyanto dan Widodo, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas, pengaruh belanja terhadap penganggaran akan lebih diperhatikan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah. Terutama belanja langsung yang memiliki rutinitas dalam keseharian realisasi penganggaran dan memiliki jumlah yang relative lebih banyak untuk dianggarkan disamping kebutuhan terhadap belanja tidak langsung ataupun pembiayaan lainnya.

Pengukuran kinerja keuangan mengenai belanja langsung bisa dinilai kesuksesan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan relatif melalui analisis rasio keuangan.

Dengan pengukuran menggunakan rasio keuangan diharapkan pemerintah daerah selaku pihak yang merealisasikan APBD dapat menjadikan rasio keuangan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah agar kedepannya pemerintah daerah dapat lebih maksimal dalam menyerap anggaran dan bijak dalam menganggarkan pengeluaran dan belanja sehingga tercapai pemerintah yang berkembang, pembangunan berstandar yang baik dan pelayanan masyarakat sesuai kriteria yang baik.

Bagi kota/kabupaten yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi, maka tidak akan menjadi masalah untuk mengeluarkan belanja langsung yang tinggi pula guna menjalankan semua program peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperlukan kinerja yang baik dari pemerintah, agar PAD yang ada dapat tersalurkan dengan baik dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bertugas untuk mengelola PAD adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok

yaitu sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dalam menyerap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah).

Untuk itu pembahasan mengenai keterkaitan pengukuran belanja langsung dengan pengukurannya menggunakan analisis rasio keuangan perlu diteliti lebih lanjut pada suatu instansi pemerintahan yang berada pada sektor keuangan daerah, dalam hal ini akan dilihat prosesnya pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Sumatera Barat. Oleh karena itu penulis tertarik membahas lebih lanjut dengan judul **“Prosedur Penggunaan Belanja Langsung Dan Perhitungannya Menggunakan Metode Rasio Keuangan”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana prosedur penggunaan belanja langsung dalam klasifikasi belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?
2. Bagaimana penghitungan keberhasilan kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang menggunakan analisis rasio keuangan?
3. Bagaimana keterkaitan penghitungan menggunakan analisis rasio keuangan dalam menentukan kebijakan dalam penganggaran belanja langsung ?

1.3 Tujuan Magang

Berdasarkan beberapa perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosuder penggunaan belanja langsung dalam klasifikasi belanja daerah pada Dinas Pendapatan Kota Padang.
2. Memahami bagaimana penghitungan keberhasilan kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang menggunakan analisis rasio keuangan.
3. Untuk mengetahui keterkaitan penghitungan menggunakan analisis rasio keuangan dalam menentukan kebijakan dalam penganggaran belanja langsung.

1.4 Manfaat Magang

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang yaitu :

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pekerjaan di lapangan kerja.
 - b. Proses mengaplikasikan teori-teori pada perkuliahan pada praktek kerja sesungguhnya
2. Bagi Pembaca

Melalui penulisan ini diharapkan pembaca mendapatkan informasi mengenai belanja langsung dan penghitungannya menggunakan analisis rasio keuangan.

1.5 Metodologi Penulisan

Penulisan didasari oleh pengumpulan data mengenai pengelolaan anggaran khususnya belanja langsung dengan cara mengadakan observasi langsung dan wawancara yang dilakukan penulis langsung dengan pegawai kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Pengumpulan data juga dilakukan dengan studi pustaka, yang mana dalam hal ini juga menggunakan teori-

teori dan rumus-rumus yang diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kinerja keuangan daerah dan belanja daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, rencana kegiatan magang, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam menyelesaikan laporan magang

BAB III GAMBARAN UMUM

Berisi gambaran kantor Dinas Pendapatan Kota Padang, meliputi sejarah ringkas, visi, misi, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB IV PEMBAHASAN

Membahas tentang bagaimana prosedur penggunaan belanja langsung, penghitungan keberhasilan kinerja keuangan dan keterkaitan tersebut dalam menentukan kebijakan dalam penganggaran belanja langsung.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan seluruh pembahasan serta pemberian saran yang mungkin akan berguna untuk memecahkan permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan nantinya.

